

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kemiskinan moneter, serta berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Kemiskinan moneter, yang diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran per kapita, menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis kemiskinan moneter dilakukan dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) edisi Maret 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tinjauan pustaka ini akan mengkaji teori-teori mengenai kemiskinan, baik yang bersifat moneter maupun non-moneter, serta berbagai pendekatan dalam pengukurannya. Selain itu, akan dibahas juga hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan kemiskinan di tingkat daerah, dengan fokus pada Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan tinjauan pustaka ini, diharapkan dapat ditemukan dasar teori yang kokoh untuk menganalisis situasi kemiskinan di wilayah tersebut, serta untuk menggali faktor-faktor penyebab kemiskinan moneter yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Kuncoro, 2016).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan (porper) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Bagi para akademis, ahli statistik di BPS, dan pemerintah, "kemiskinan" didefinisikan dan dianalisis sebagai orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang definisinya bervariasi (Suyanto, 2013).

Kemiskinan sebagai kekurangan bahan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai hidup layak (Baniadi, 2018). Schiller menyatakan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Suyanto, 2013).

Kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Subandi menyatakan jika kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi dimana masyarakat berada pada tingkat ekonomi

yang lemah, ditambah kebijakan pemerintah yang sifatnya jangka pendek sehingga belum dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat miskin (Subandi, 2014).

Kemiskinan sebagai masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, lalu meningkat menjadi kesenjangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan dalam berusaha dan mengakses kegiatan ekonomi sehingga menimbulkan ketertinggalan dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi (Baniadi, 2018).

Kemiskinan sebagai situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok orang untuk menyelenggarakan hidup sampai taraf yang manusiawi (Arsyad, 2010).

Kemiskinan bukan hanya fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun esensi kemiskinan menyangkut kemungkinan orang untuk mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya (Suyanto, 2013).

Inti dari masalah kemiskinan adalah mata rantai yang kadang disebut lingkaran setan, sindrom kemiskinan, ataupun perangkap kemiskinan. Mata rantai yang membentuk perangkap kemiskinan itu terdiri dari: kemiskinan itu sendiri, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan (Chambers, 1997).

Kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial yang dimaksud adalah: modal produktif/aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik untuk mencapai kepentingan bersama, network/jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, pengetahuan dan

keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna untuk kehidupan (Friedman, 2000).

Dari beberapa pengetahuan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan ia tidak mampu mengakumulasi aset dan mengakses layanan sosial.

2.1.1.2 Macam-Macam Kemiskinan

Kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan yang meliputi konsumsi pribadi dan kebutuhan pelayanan sosial. Kemiskinan kedua yaitu kemiskinan relatif, dimana tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitarnya (Arsyad, 2010).

Sedangkan menurut Mochtar Mas'ood dalam Baniadi (2018) kemiskinan jika ditinjau dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah timbul akibat kelangkaan SDA (Sumber Daya Alam). Kondisi tanah yang tandus, tidak tersedianya irigasi, dan langkanya prasarana lain merupakan penyebab utama kemiskinan. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena munculnya kelembagaan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi secara merata.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi kemiskinan alami (kultural) dan kemiskinan buatan (struktural). Kemiskinan alami (kultural) berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, tingkat produktivitas, dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan buatan (struktural) merupakan masalah yang timbul karena strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Subandi, 2014).

Kemiskinan buatan kerap diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Selo Soemardjan menganggap bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut, sehingga membuat masyarakat tersebut tidak mampu menikmati sumber pendapatan yang tersedia (Arsyad:, 2010:301).

Sedangkan menurut Limbong (2011) kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang terorganisasi sehingga terjadi proses pemiskinan rakyat. Ciri utama kemiskinan struktural adalah tidak terjadinya mobilitas sosial vertikal, walaupun ada sifatnya lamban sekali. Masyarakat miskin akan tetap miskin, sedangkan golongan kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada kungkungan struktural yang membuat orang miskin menjadi malas untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Suyanto, 2013).

2.1.1.3 Indikator Kemiskinan

Menurut Rustanto (2015) terdapat tiga indikator kemiskinan yang dianggap sebagai kontruksi yang membentuk kemiskinan di Indonesia, yaitu :

1. Aspek ekonomi dapat dibagi menjadi delapan indikator, yaitu : terpenuhinya kebutuhan pangan yang bermutu, memiliki rumah yang memadai, pemenuhan kebutuhan sandang minimal satu set per tahun, pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar, pemenuhan akses layanan kesehatan, terpenuhinya akses lapangan pekerjaan, ketersediaan akses air bersih yang cukup, dan kepemilikan aset.
2. Aspek Sosial dibagi menjadi tujuh indikator, yaitu : kemudahan mengakses informasi, kemudahan mengakses transportasi, kemudahan mengakses pelayanan sosial, kemudahan mengakses pelayanan pemerintah, terbukanya kesempatan berusaha serta pemilikan sumber yang strategis, kemampuan menjalankan peran sosial di keluarga, dan kemampuan menjalankan peran sosial di masyarakat dan pemerintah.
3. Aspek Budaya dibagi menjadi tujuh indikator, yaitu : memiliki tingkat disiplin yang tinggi dimasyarakat, menjaga kebersihan dan kesehatan, memiliki etos kerja yang tinggi, mengatur pengeluaran dengan baik, berorientasi ke masa depan (selalu ingin maju), gigih memperjuangkan nasib atau tidak mudah menyerah pada nasib, dan memiliki sikap mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain.

2.1.1.4 Teori Kemiskinan

Menurut Suharto dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi (Astuti, 2015).

a. Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan merupakan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan kemiskinan harus tidak bersifat sementara. Namun tidak hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan.

b. Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori Sosial Demokrat kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Pada pendukung Sosial-Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan

Sedangkan menurut Becker, membagi teori kemiskinan menjadi teori modal manusia, teori investasi dalam modal manusia, teori pilihan keluarga, Model Keluarga dan Kemiskinan Intergenerasional, Teori Diskriminasi Ekonomi sebagai berikut:

- Teori Modal Manusia

Menurut Becker menetapkan bahwa bukan keberuntungan maupun kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan, melainkan investasi individu yang

terencana dalam modal manusia terutama pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan penghasilan dan memper ringankan penderitaan bahkan bagi pekerja kemampuan terendah sekalipun (Polachek, 2007). Becker memulai penelitiannya pada human capital setelah mengamati bahwa pendapatan pekerja kulit putih dan kulit hitam meningkat secara signifikan seiring dengan tahun sekolah mereka, dan studi utamanya bertujuan untuk menghitung tingkat pengembalian pada investasi dalam pendidikan untuk berbagai kelompok setelah biaya pendidikan dikurangi dari manfaat penghasilan (Foss et al., 2011; Muhsam & Becker, 1965). Teori pemecahan masalah yang inovatif ini mengubah pemahaman pendapatan dan mengatasi kemiskinan dengan memperlakukan pendidikan sebagai bentuk investasi ketimbang konsumsi murni.

Teori Modal Manusia merupakan salah satu pendekatan penting dalam menjelaskan peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Teori ini memandang manusia tidak hanya sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat dikembangkan melalui investasi, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan.

Becker (1993) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu. Investasi pendidikan tersebut akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah (Becker, 1993).

Lebih lanjut, Becker menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas akibat investasi pendidikan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pendidikan memungkinkan individu untuk bekerja secara lebih efisien, beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta memiliki peluang yang lebih luas dalam pasar tenaga kerja (Becker, 1993).

- Teori Investasi dalam Modal Manusia

Menurut Becker dengan membagi investasi human capital menjadi dua kategori utama: general human capital dan firm-specific human capital (Bryant & Javalgi, 2014). General human capital berlaku di seluruh industri dan meningkatkan produktivitas marginal individu serta increasing nilai individu bagi perusahaan-perusahaan dalam industri, sehingga perusahaan yang membayar upah tertinggi akan menarik talenta terbaik (Bryant & Javalgi, 2014). Sementara itu, firm-specific human capital tidak berlaku secara umum di seluruh industri tetapi hanya meningkatkan produktivitas marginal dalam satu firma spesifik, dan karena itulah perusahaan menanggung biaya untuk pelatihan spesifik ini (Bryant & Javalgi, 2014). Dalam kerangka Becker, perbedaan investasi human capital untuk jumlah yang sama dapat memberikan penghasilan yang lebih banyak bagi sebagian pekerja dan lebih sedikit bagi pekerja lain, bergantung pada keduanya penawaran dan permintaan kondisi (Aspilaire, 2017).

- Teori Pilihan Keluarga

Menurut Becker melalui karya pionir "*A Theory of Fertility Choice*" yang memperlakukan anak-anak sebagai analogi dengan barang konsumsi tahan lama

seperti mobil atau rumah dengan asumsi bahwa preferensi diberikan tertentu sehingga perubahan pendapatan dan harga relative menjadi kunci penjelas tren fertilitas (Doepke, 2014, 2015). Kontribusi penting Becker adalah ide trade-off antara kuantitas dan kualitas anak dalam pilihan fertilitas: ketika pendapatan meningkat, harga implisit untuk meningkatkan kualitas anak naik, sehingga orang tua menghadapi trade-off yang di bawah kondisi plausible yang terpenuhi di semua ekonomi modern, mengarahkan ke lebih sedikit namun anak kualitas lebih tinggi yang diproduksi (Heckman, 2015; Miranda & Trivedi, 2020). Jika elastisitas pendapatan untuk kualitas lebih besar daripada elastisitas pendapatan kuantitas, maka orang tua akan menggantikan kualitas untuk kuantitas saat pendapatan meningkat (Miranda & Trivedi, 2020).

- Model Keluarga dan Kemiskinan Intergenerasional

Dikenal sebagai model Becker-Tomes, yang menyediakan kerangka untuk memahami mobilitas pendapatan antar generasi dan ketidaksetaraan dalam generasi secara terpadu dengan mengakui bahwa orang tua peduli dan mampu memengaruhi kapasitas penghasilan anak-anak mereka (Corak, 2006). Orang tua yang altruistik, berdasarkan preferensi dan kendala mereka, memutuskan berapa banyak untuk berinvestasi dalam human capital anak-anak mereka dan mengalokasikan waktu serta uang antara konsumsi saat ini dan investasi masa depan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masa depan anak. Human capital didefinisikan secara luas untuk meliputi investasi dalam pendidikan tinggi, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan perkembangan sosial anak (Corak, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam anak dan human capital orang

tua, bukan ketekunan kemampuan bawaan, memiliki dampak terbesar pada mobilitas intergenerasional (Vandenbroucke et al., 2016).

- Teori Diskriminasi Ekonomi

Menurut Becker dalam buku pionir "*The Economics of Discrimination*" yang memperkenalkan konsep "*discrimination coefficients*" yang mengintegrasikan pengaruh etnisitas, gender, dan karakteristik pribadi lainnya pada selera dan sikap (Jones, 2014). Becker memodelkan diskriminasi sebagai preferensi pemberi kerja yang merasa ketidaknyamanan ketika berinteraksi dengan pekerja dari kelompok minoritas, yang membuat mereka bertindak seolah-olah pekerja dari kelompok tersebut membawa premi upah dan sehingga kurang menarik untuk dipekerjakan (Lazear, 1999; Salamanca & Feld, 2016). Hasil kunci dari model Becker adalah bahwa celah upah racial dalam kesetimbangan tidak ditentukan oleh tingkat rata-rata prasangka di antara semua pemberi kerja karena tekanan pasar menyortir minoritas dari orang prasangka terburuk, melainkan oleh pemberi kerja paling prasangka yang masih bersedia mempekerjakan pekerja dari kelompok yang didiskriminasi yang Becker sebut sebagai "*marginal discriminator*" (Charles & Guryan, 2011; Salamanca & Feld, 2016). Dalam jangka panjang, teori Becker memprediksi bahwa pasar akan mengeliminasi diskriminasi karena perusahaan yang tidak mendiskriminasi akan memiliki biaya upah yang lebih rendah dan mengungguli perusahaan yang mendiskriminasi dalam kompetisi (Lazear, 1999; Salamanca & Feld, 2016).

2.1.1.5 Kemiskinan Moneter

2.1.1.5.1 Pengertian Kemiskinan Moneter

Kemiskinan moneter merupakan konsep kemiskinan yang mengukur kesejahteraan individu atau rumah tangga berdasarkan kemampuan ekonomi yang tercermin melalui tingkat pengeluaran atau pendapatan. Dalam pendekatan ini, seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita yang dikeluarkan berada di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (BPS, 2023). Pendekatan moneter banyak digunakan dalam survei dan statistik nasional, termasuk oleh Badan Pusat Statistik (BPS), karena dianggap mampu menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih objektif dan terukur.

Kemiskinan moneter didefinisikan sebagai pendekatan yang memandang kemiskinan sebagai kekurangan individu untuk mencapai tingkat konsumsi atau pendapatan minimum yang diukur berdasarkan garis kemiskinan (poverty line) yang telah ditentukan (Agustin, 2022; Kharisma et al., 2020). Menurut pandangan ini, seseorang dikategorikan miskin ketika rata-rata pengeluaran bulanan per kepala berada di bawah nilai garis kemiskinan, di mana nilai garis kemiskinan dihitung dari total gabungan nilai garis kemiskinan makanan dengan nilai garis kemiskinan non-makanan (Agustin, 2022). Pendekatan moneter ini merupakan yang paling sering digunakan untuk mengukur kemiskinan karena mengukur kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi akibat pendapatan yang dimiliki berada di bawah garis kemiskinan (Nuryitmawan, 2016).

Dalam Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial RI mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (Haryanto, 2013). Kemiskinan dipahami sebagai kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non-makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*) (Haryanto, 2013). Garis kemiskinan diartikan sebagai sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (Haryanto, 2013).

Garis kemiskinan moneter mencerminkan nilai minimum pendapatan yang harus diperoleh masyarakat agar mendapatkan standar hidup layak (Agustin, 2022). Pendekatan moneter memiliki daya tarik karena kompatibel dengan asumsi maksimisasi utilitas dalam mikroekonomi, dengan anggapan bahwa tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas dan pengeluaran mencerminkan nilai atau utilitas marjinal orang terhadap sebuah barang (Nuryitmawan, 2016). Pada perspektif internasional, salah satu definisi kemiskinan yang paling umum adalah garis kemiskinan dengan pendapatan minimum US\$1 per hari yang masih digunakan Bank Dunia untuk membandingkan kemiskinan secara global (CIFOR, 2007; Piwowarski et al., 2021).

Kemiskinan moneter, yang merupakan indikator ekonomi, pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang (Haryanto,

2013). Di Uni Eropa, kemiskinan moneter diukur sebagai proporsi total penduduk dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan yang tersetarasi (equivalised disposable income) di bawah ambang risiko kemiskinan sebesar 60% dari median pendapatan nasional yang tersetarasi setelah transfer sosial (Canale & Liotti, 2021, 2022). Pendekatan ini menggunakan pengukuran pendapatan atau konsumsi sebagai sarana utama untuk mengidentifikasi kelompok miskin, di mana langkah pertama adalah menetapkan garis kemiskinan (Azami, 2021; Canale & Liotti, 2021).

2.1.1.5.2 Indikator Pengukuran Kemiskinan Moneter

Pengukuran kemiskinan moneter pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yang dapat menilai kemampuan ekonomi rumah tangga berdasarkan tingkat pengeluarannya. Dalam pendekatan ini, kesejahteraan individu direpresentasikan oleh konsumsi atau pengeluaran per kapita karena dianggap lebih stabil dibandingkan pendapatan dan mencerminkan pola pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemiskinan moneter terdiri dari berbagai komponen yang dapat menggambarkan jumlah, kedalaman, dan keparahan kemiskinan di suatu wilayah (BPS, 2023).

Maka dapat diuraikan indikator yang menjadi dasar pengukuran kemiskinan moneter sebagai berikut:

a. Garis Kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran yang diperlukan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan terdiri dua macam yaitu Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM terlihat dari jumlah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan energi minimum yaitu sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM meliputi sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah total garis kemiskinan. Indikator ini penting karena menjadi acuan utama dalam menentukan status miskin atau tidak miskin dalam pendekatan moneter. Rumus untuk menghitung Garis Kemiskinan suatu wilayah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

b. *Foster Greer Thorbecke (FGT) Index*

Indeks Foster–Greer–Thorbecke (FGT) merupakan salah satu ukuran kemiskinan yang banyak digunakan dalam analisis kemiskinan moneter. Indeks ini diperkenalkan oleh Foster, Greer, dan Thorbecke sebagai alat ukur kemiskinan yang tidak hanya melihat jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan (Foster, Greer, & Thorbecke, 1984).

Secara umum, Indeks FGT dirumuskan sebagai berikut:

$$FGT(\alpha) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^2$$

Keterangan:

N = jumlah penduduk

q = jumlah penduduk miskin

z = garis kemiskinan

y_i = pendapatan atau pengeluaran penduduk miskin ke- i

α = parameter yang menunjukkan tingkat sensitivitas kemiskinan

Apabila nilai $\alpha = 0$, maka Indeks FGT dikenal sebagai *Headcount Index* (P0). Indeks ini menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Headcount Index hanya mengukur tingkat kemiskinan dari sisi jumlah penduduk miskin tanpa memperhatikan tingkat kedalaman kemiskinan.

Jika nilai $\alpha = 1$, maka Indeks FGT disebut sebagai *Poverty Gap Index* (P1). Indeks ini mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. *Poverty Gap Index* memberikan gambaran mengenai seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sehingga mencerminkan kedalaman kemiskinan.

Apabila nilai $\alpha = 2$, maka Indeks FGT dikenal sebagai *Poverty Severity Index* (P2). Indeks ini memberikan bobot yang lebih besar kepada penduduk miskin yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, P2 mampu menggambarkan tingkat keparahan kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Foster Greer Thorbecke sangat relevan digunakan dalam analisis kemiskinan moneter karena mampu mengukur kemiskinan secara komprehensif, mulai dari tingkat kemiskinan, kedalaman, hingga keparahannya. Dalam penelitian ini, Indeks FGT digunakan untuk menganalisis kemiskinan moneter di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data SUSENAS Maret 2024, sehingga hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kemiskinan di wilayah penelitian.

c. Pengeluaran per kapita

Pengeluaran per kapita adalah total nilai konsumsi yang dikeluarkan oleh rumah tangga dalam periode tertentu (biasanya satu bulan), yang kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Konsep ini digunakan sebagai indikator kesejahteraan karena menggambarkan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), pengeluaran per kapita dihitung dari seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meliputi pengeluaran makanan dan non-makanan, lalu dibagi jumlah anggota rumah tangga untuk memperoleh nilai per individu. BPS menyatakan bahwa pengeluaran per kapita lebih stabil dibandingkan pendapatan, sehingga lebih tepat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan dan dasar penghitungan kemiskinan.

Selain itu, World Bank (2018) menegaskan bahwa indikator pengeluaran konsumsi lebih akurat mencerminkan kondisi kesejahteraan karena pendapatan sering bersifat fluktuatif, tidak pasti, atau tidak tercatat, terutama pada rumah tangga yang bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia menggunakan pengeluaran per kapita sebagai basis dalam mengukur kemiskinan moneter.

Menurut Todaro & Smith (2020), pengeluaran per kapita mencerminkan daya beli rumah tangga dan menjadi pendekatan yang paling umum dalam analisis ekonomi pembangunan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, maka semakin tinggi pula kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, indikator pengukuran kemiskinan moneter tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperlihatkan seberapa dalam dan parah kemiskinan tersebut. Kombinasi antara garis kemiskinan, pengeluaran per kapita, dan indikator FGT memberikan gambaran yang komprehensif untuk menganalisis kondisi kemiskinan secara akurat pada tingkat daerah, seperti Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.1.5.3 Teori Kemiskinan Moneter

Teori kemiskinan moneter, yang berakar dari studi awal Booth dan Rowntree di abad ke-19, mendefinisikan kemiskinan berdasarkan ketidakcukupan pendapatan dan konsumsi. Pendekatan ini menetapkan garis kemiskinan berdasarkan biaya kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal,

dengan asumsi bahwa siapa pun yang pendapatannya di bawah garis ini dianggap miskin (Azami, 2021).

Martin Ravallion mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana kesejahteraan seseorang tidak mencapai "tingkat minimum yang wajar" sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masyarakat. Garis kemiskinan dalam konteks ini merepresentasikan biaya moneter yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum tersebut (Hadrachi & Kamli, 2022).

Amartya Sen pada awalnya berkontribusi pada pendekatan unidimensional dengan mengidentifikasi populasi miskin berdasarkan tingkat pendapatan dan konsumsi yang rendah. Meskipun demikian, Sen kemudian mengembangkan teori kapabilitas yang berargumen bahwa kemiskinan seharusnya tidak hanya dilihat dari segi moneter, melainkan juga dari kurangnya akses terhadap sumber daya dan peluang yang membatasi kebebasan individu (Thapa et al., 2012).

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan pendapatan dan sumber daya produktif yang diperlukan untuk menjamin mata pencarian yang berkelanjutan. Kitae Yoo lebih lanjut menyoroti bahwa banyak studi dan organisasi menganggap pendapatan rendah sebagai inti dari kemiskinan (Yoo, 2023).

Secara historis, David Ricardo berpendapat bahwa kemiskinan dapat diperparuh oleh pertumbuhan populasi yang melampaui kemampuan sumber daya, menyebabkan penurunan pengembalian tenaga kerja (Shaikh et al., 2023). Dalam pengukuran modern, model Foster-Greer-Thorbecke digunakan untuk mengukur berbagai dimensi kemiskinan moneter, termasuk jumlah orang miskin, kedalaman

kemiskinan, dan keparahan kemiskinan, dengan mempertimbangkan perubahan harga, pendapatan, dan konsumsi (Foster et al., 2010).

Meskipun teori moneter tetap menjadi dasar penting, terdapat kritik yang kuat terhadap fokus eksklusif pada ukuran moneter. Misalnya, Townsend, serta Mack dan Lansley, menekankan konsep kekurangan (*deprivation*), yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mempertahankan kondisi hidup yang layak akibat kurangnya sumber daya (Dudek & Szcześny, 2020).

Sedangkan menurut baswir secara sosio ekonomi terdapat dua bentuk kemiskinan yaitu sebagai berikut ini : (Sudarwati,2009: 24-25)

- a. Kemiskinan absolut yaitu merupakan suatu kemiskinan dimana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan. Atau jumlah pendapatannya tidak cukup dalam mencukupi kebutuhan hidup minimumnya seperti halnya kebutuhan dalam makan, dalam berpakaian, fasilitas kesehatannya, tingkat pendidikannya, kalori, serta GNP per-kapita, dan konsumsi atau pengeluaran dan lainlain.
- b. Kemiskinan relatif yaitu merupakan suatu perbandingan antara tingkat pendapatan seseorang dengan pendapatan lainnya, misalnya dimana terdapat orang kaya pada desa tertentu akan tetapi di desa lain bisa jadi orang tersebut tergolong orang miskin.

2.1.2 Produktivitas Usia

2.1.2.1 Pengertian Produktivitas Usia

Usia produktif merupakan konsep penting dalam memahami struktur penduduk dan kekuatan kerja suatu negara. Secara struktur demografis, penduduk dikategorikan menjadi tiga kelompok utama: kelompok usia muda atau belum produktif (di bawah 15 tahun atau 0–14 tahun), kelompok usia produktif (15–64 tahun), dan kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) (Aziz et al., 2021). Dalam konteks ketenagakerjaan, penduduk yang secara resmi dinyatakan dapat bekerja juga berada pada rentang usia yang sama, yaitu mulai usia 15 tahun sampai 64 tahun (Himaya & Wirjatmadi, 2019).

Hubungan antara usia dan produktivitas kerja memiliki dimensi fisik yang sangat relevan. Usia memengaruhi secara signifikan kemampuan kerja fisik maupun kekuatan otot; kemampuan fisik maksimal untuk baik laki-laki maupun perempuan dicapai pada umur 25–35 tahun, setelah itu kemampuan fisik keduanya semakin menurun dengan bertambahnya umur (Puspadewi et al., 2018). Secara lebih rinci, kondisi kinerja fisik berada pada puncak pada usia pertengahan dua puluhan, kemudian menurun seiring bertambahnya usia dan mengalami pengurangan sekitar 20% pada usia 60 tahun akibat keterbatasan faktor fisik dan kesehatan (Himaya & Wirjatmadi, 2019).

Beberapa studi pendidikan tenaga kerja di Indonesia memberikan perspektif tambahan tentang produktivitas usia. Terdapat pendapat bahwa usia produktif berada pada rentang 15–54 tahun, di mana kinerja mencapai puncak pada usia pertengahan dua puluhan dan kemudian menurun saat bertambahnya usia (Farikha

& Ardyanto, 2017). Dalam konteks tenaga kerja industri, usia produktif (15–60 tahun) berhubungan positif dengan produktivitas tenaga kerja; artinya, ketika usia tenaga kerja berada dalam kategori produktif, produktivitasnya meningkat karena didukung oleh pengetahuan, wawasan, serta tanggung jawab yang lebih baik terhadap tugas (Ukkas, 2017).

Secara keseluruhan, faktor usia dan kemampuan fisik memainkan peran krusial dalam menentukan produktivitas kerja. Umur sangat berpengaruh terhadap kemampuan fisik tenaga kerja, di mana usia muda cenderung berproduksi lebih besar, sedangkan usia tua produktivitasnya mengalami penurunan (Ukkas, 2017). Pemahaman mengenai produktivitas usia ini menjadi penting bagi perencanaan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, serta perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan dinamika kapasitas fisik dan produktivitas sepanjang siklus hidup pekerja.

2.1.2.2 Teori Produktivitas Usia

Usia merupakan salah satu faktor demografis yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan partisipasi seseorang dalam kegiatan ekonomi. Dalam kajian ekonomi pembangunan, struktur usia penduduk menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output ekonomi.

Penduduk usia produktif merupakan kelompok usia yang memiliki potensi ekonomi lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (Todaro & Smith, 2015). Penduduk usia produktif, yang umumnya berada pada rentang usia 15–64 tahun, memiliki kemampuan fisik, keterampilan, serta kesempatan yang

lebih luas untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan produksi dan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, kelompok usia ini menjadi motor penggerak utama dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, penduduk usia nonproduktif, yaitu kelompok usia anak-anak dan lanjut usia, memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang lebih tinggi karena keterbatasan kemampuan fisik maupun kapasitas kerja. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok usia nonproduktif belum atau tidak lagi dapat berkontribusi secara optimal dalam kegiatan produktif, sehingga perannya dalam perekonomian lebih bersifat pasif.

Dengan demikian, semakin besar proporsi penduduk usia produktif dalam suatu wilayah, maka semakin besar pula peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Struktur usia penduduk yang didominasi oleh usia produktif dapat menjadi potensi strategis apabila diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.1.3 Gender

2.1.3.1 Pengertian Gender

Gender adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari konstruksi sosial budaya dan bukan dari perbedaan seksual biologis (Asiyah & Ibrahim, 2021; Beddu, 2019). Gender berfungsi sebagai bentuk rekayasa masyarakat yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pengaruh sosial budaya, serta merupakan konsep kultural yang membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara keduanya (Asiyah & Ibrahim, 2021; Beddu, 2019; Siregar & Amran, 2020).

Gender harus dibedakan dari jenis kelamin atau seks; seks merupakan pembagian biologis yang melekat secara permanen, sedangkan gender adalah sifat yang dikonstruksi secara sosial dan kultural yang berinteraksi dengan tetapi berbeda dari kategori biologis (Asiyah & Ibrahim, 2021; Kaufman et al., 2023; Nurzaimah & Haryanti, 2021). Gender dapat diartikan sebagai perilaku, aktivitas, dan atribut yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat pada masa tertentu (Kaufman et al., 2023; Schiappa, 2021).

Sebagai konsep analisis, gender digunakan untuk menjelaskan sesuatu di dalam masyarakat berdasarkan perbedaan bawaan dan bentukan budaya yang dipelajari sejak kecil dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta bervariasi antar budaya (Asiyah & Ibrahim, 2021; Beddu, 2019; Larasati & Ayu, 2020). Gender dipahami sebagai identifikasi personal yang dikonstruksi secara sosial dan kultural dengan peran gender spesifik yang terkait dengan standar femininitas dan maskulinitas dalam masyarakat (Garncarek, 2020; Herzberg, 2015).

Dalam perspektif ini, gender adalah sesuatu yang dilakukan atau diperankan (performance) sejak saat hubungan antara individu dan masyarakat terbentuk, bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir (Bohan, 1992; Slater, 2019). Identitas gender adalah perasaan internal dan mendalam tentang diri seseorang yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir (Kaufman et al., 2023), sedangkan peran-peran yang berkembang dari gender tidak hanya berasal dari perbedaan biologis tetapi juga dapat berubah dan bervariasi dalam serta antar budaya (Muhammed-Oyebode, 2021).

Gender berkaitan erat dengan konsep maskulin dan feminin yang dibentuk oleh masyarakat di mana maskulin diasosiasikan dengan kekuatan, daya tahan, keberanian, kekuasaan, dan kesuksesan, sedangkan feminin dibebankan dengan kepekaan, emosionalitas, kelemahan, dan ketergantungan (Protosavitska et al., 2023; Yunus et al., 2024). Namun, sifat-sifat ini bersifat dapat dipertukarkan dan tidak permanen karena pembentukan feminin dan maskulin terjadi melalui proses sosialisasi yang dapat berubah sesuai tahapan tertentu (Protosavitska et al., 2023).

2.1.3.2 Teori Gender

Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran, tanggung jawab, serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan tersebut tidak bersifat biologis, melainkan terbentuk melalui proses sosial, budaya, dan kebijakan yang berkembang dalam suatu masyarakat.

Struktur sosial yang ada dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kesempatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan (Mosse, 2014). Struktur sosial tersebut tercermin dalam pembagian peran kerja, akses terhadap sumber daya ekonomi, pengambilan keputusan, serta kontrol atas hasil produksi. Dalam banyak konteks, perempuan seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan akibat norma sosial dan budaya yang membatasi ruang gerak mereka dalam kegiatan ekonomi.

Ketimpangan gender dalam kesempatan ekonomi bukan disebabkan oleh perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan, melainkan oleh sistem sosial yang belum memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara (Mosse,

2014). Ketidaksetaraan ini berdampak pada rendahnya partisipasi ekonomi perempuan serta terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi.

Dengan demikian, pemahaman terhadap teori gender menjadi penting dalam menganalisis permasalahan ekonomi dan pembangunan, khususnya dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan kesempatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

2.1.4 Beban Tanggungan

2.1.4.1 Pengertian Beban Tanggungan

Beban tanggungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia kerja produktif (15–64 tahun) yang menggambarkan beban ekonomi yang harus dipikul oleh populasi usia kerja (Heryanah, 2015; Rostiana & Rodesbi, 2020; Wintara et al., 2021). Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk berumur 0–14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun (Heryanah, 2015; Prskawetz & Hammer, 2019).

Dependensi ratio terdiri dari *youth dependency ratio* (rasio ketergantungan muda) yaitu perbandingan jumlah penduduk umur 0–14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15–64 tahun, dan *old-age dependency ratio* (rasio ketergantungan tua) yaitu perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun (Ayuningtyas & Islami, 2022; Heryanah, 2015; Kishida & Nishiura, 2018). Keduanya membentuk total *dependency ratio* yang merupakan

jumlah dari rasio ketergantungan muda dan tua (Gupta & Wong, 2020; Jensen et al., 2022).

Dependency ratio digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan secara kasar kondisi ekonomi sebuah negara dan beban yang harus dipikul oleh populasi produktif untuk membiayai kehidupan penduduk tidak produktif (Kleiman, 1967; Prskawetz & Hammer, 2019; Wintara et al., 2021). Semakin tinggi *dependency ratio* mengindikasikan semakin tinggi beban yang harus dipikul oleh penduduk usia kerja, sementara semakin rendah *dependency ratio* menunjukkan semakin kecil beban tersebut dan menandakan adanya bonus demografi (Farihah, 2018; Rostiana & Rodesbi, 2020; Wintara et al., 2021).

2.1.4.2 Teori Beban Tanggungan

Beban tanggungan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara jumlah anggota keluarga yang tidak produktif dengan kemampuan ekonomi rumah tangga. Dalam kajian pembangunan dan ekonomi keluarga, besarnya jumlah tanggungan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Boserup menjelaskan bahwa semakin banyak anggota keluarga, maka semakin besar pula beban konsumsi rumah tangga yang harus dipenuhi. Peningkatan jumlah anggota keluarga, khususnya anggota yang belum atau tidak produktif secara ekonomi, akan menambah kebutuhan konsumsi seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (Boserup, 2010).

Lebih lanjut, Boserup menegaskan bahwa apabila pertambahan jumlah anggota keluarga tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan rumah tangga, maka

kemampuan ekonomi keluarga akan semakin tertekan. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan meningkatkan risiko kemiskinan, karena pendapatan yang tersedia harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lebih banyak (Boserup, 2010).

Dengan demikian, teori beban tanggungan menegaskan bahwa struktur rumah tangga, khususnya jumlah anggota keluarga dan rasio ketergantungan, memiliki peranan penting dalam menentukan kondisi ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan beban tanggungan yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan produktivitas anggota keluarga.

2.1.5 Pendidikan

2.1.5.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi individu agar dapat mencapai kedewasaan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat (Basyit et al., 2022; Winarsih, 2017). Proses ini melibatkan pembekalan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan karakter dan budi pekerti melalui pengajaran dan pelatihan, yang dapat berlangsung dalam berbagai lingkungan, baik formal maupun informal, sepanjang hayat (Basyit et al., 2022; Bintank & Maunah, 2022; Winarsih, 2017).

Menurut beberapa ahli, pendidikan memiliki berbagai makna. Aristoteles memandang pendidikan sebagai persiapan akal pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan (Yusuf et al., 2020). Sementara itu, Johan Heinrich Pestalozzi

mengartikan pendidikan sebagai pembekalan yang diberikan pada masa kanak-kanak untuk bekal di masa dewasa (Yusuf et al., 2020). Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Basyit et al., 2022).

Secara umum, pendidikan berfungsi untuk menyiapkan generasi muda agar memegang peranan tertentu dalam masyarakat di masa depan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai, serta memelihara keutuhan sosial (Hanafi, 2017). Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan keyakinan peserta didik terhadap agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga membawa kemajuan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara (Alim, 2020). Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai sosialisasi, seleksi, latihan, inovasi, perubahan sosial, serta pengembangan pribadi dan sosial (Mutiani et al., 2022). Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi terjadinya kemiskinan terhadap masyarakat, karena pendidikan merupakan hal terpenting yang harus ditempuh untuk mempelajari segala sesuatu supaya bisa menghadapi segala bentuk permasalahan dalam kehidupannya (Aeni, 2021). Rendahnya tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan terbatasnya kemampuan individu dalam mengembangkan diri dan bersaing di dunia kerja, sehingga berpotensi menjebak seseorang dalam kondisi kemiskinan (Adhitya et al., 2022).

2.1.5.2 Teori Pendidikan

Beberapa teori pendidikan menjelaskan bagaimana pendidikan dapat berkontribusi pada atau dipengaruhi oleh kemiskinan. Salah satu konsep penting

adalah Penyebab Sirkular Kumulatif yang dikemukakan oleh Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu wilayah dapat menghambat pengembangan pendidikan, yang kemudian menghasilkan tingkat pendidikan rendah, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya melanggengkan lingkaran kemiskinan (Jiménez-Bandala & Andrade, 2017; Rosas & Jiménez-Bandala, 2018). Ini juga dikenal sebagai Jebakan Kemiskinan, di mana individu atau wilayah terjebak dalam siklus kemiskinan karena kesulitan dalam mencapai pendidikan yang memadai, dengan putus sekolah dan rendahnya prospek pendidikan sebagai faktor pendorongnya (Baquen, 2023).

Teori Kualitas Pendidikan menekankan bahwa kualitas pengajaran, kurikulum, dan infrastruktur pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk pasar kerja (Rauch et al., 2022).

Teori Konflik berpendapat bahwa sistem pendidikan dapat mempertahankan ketidaksetaraan sosial dengan perpetuasi mekanisme kontrol yang merugikan siswa berpenghasilan rendah, menunjukkan bahwa kegagalan akademik seringkali mencerminkan disparitas pendapatan yang tidak setara dalam masyarakat (Chen, 2024).

Teori Siklus Generasi Kemiskinan menyoroti potensi pendidikan berkualitas untuk memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi dengan meningkatkan peluang masa depan bagi anak-anak dari keluarga miskin (Rauch et al., 2022). Oleh karena itu, pentingnya Akses Setara terhadap pendidikan berkualitas ditekankan untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan (Rauch et al., 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
1	Rifki Khoirudin (2020)	Analisis Faktor Kemiskinan Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Barat 2013-2018	Kuantitatif (AF Index, Statistik Multivariat)	Penyumbang terbesar kemiskinan: pendidikan dan sanitasi.	Jurnal Elastisitas
2	Auliah, Rikna dan Irijanto, Thresna (2021)	Analisis pengaruh Program keluarga Harapan (Pkh) Terhadap penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjuka bahwa pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan berdasarkan aspek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunantingkat kemiskinan dengan persentase 63,4%, sedangkan berdasarkan aspek kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dengan persentase 71,5%.	Brainy Volume 2, No. 2, Bulan Desember 2021, Halaman. 36-45
3	Damaiyanti, D. dkk. (2023)	Analisis Determinan Rumah Tangga Miskin Di Riau: Pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi	Kuantitatif (regresi data panel)	Hasil penelitian menunjukan bahwa kemiskinan multidimensi yang cukup tinggi, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Meskipun tingkat kemiskinan moneter menurun, masih banyak rumah tangga yang mengalami kekurangan akses sekolah, gizi, sanitasi, dan air bersih.	JDEP Vol. 6 No. 3 (2023) hlm 208-225
4	Setiawan dan Putri. (2023)	SDM & Kemiskinan Multidimensi di Jawa Barat	Kuantitatif (Regresi & MPI Index)	Peningkatan SDM menurunkan nilai MPI.	

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
5	Saranty. (2025)	Analisis Karakteristik Cluster Berdasarkan Faktor-Faktor Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan Menggunakan K-Medoids Clustering	Kuantitatif (Non Hierarchical Clustering)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan terbagi menjadi 2 cluster kemiskinan, yaitu cluster wilayah tertinggal dan cluster wilayah maju, berdasarkan indikator sosial-ekonomi. Tahun 2023 terjadi perbaikan pada beberapa daerah, ditunjukkan dengan perpindahan Kota Parepare dan Palopo ke cluster wilayah maju.	Skripsi Univeristas Sulawesi Barat
6	Ainistikmalia, N., Kharisma, B., & Budiono, B. (2022).	Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Kuantitatif	Penelitian ini membuktikan bahwa rumah tangga miskin multidimensi sangat berpeluang besar menjadi rumah tangga tidak tahan pangan.	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 22(1), 72–97
7	Wantri, Yuli dan Dinar, Dede. (2022)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm: Analisa Two Stage Least Square Untuk Kasus Indonesia	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan IPM secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen IPM secara signifikan. Persamaan PE variabel independen (GE, INV, JPNDDK, MSKN) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (PE) secara signifikan.	JDEP Vol. 5 No. 1 (2022) hlm. 78-94
8	Purwadinata, Subhan., dkk. (2024)	Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Sumbawa	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa masih berada pada kondisi kemiskinan multidimensi yang tinggi, ditunjukkan dengan tingginya angka gizi buruk, morbiditas, bahan bakar memasak tidak layak, kepadatan hunian, air minum tidak layak, serta	Jurnal Elsatisitas

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
				rendahnya akses pendidikan dan internet. Hasil ini menjadi dasar dalam penentuan prioritas kebijakan penanganan kemiskinan.	
9	Theodere, Jemeia dan Fithriyah. (2024)	Analisis Determinan Kemiskinan Multidimensi di Indonesia	Kuantitatif (regresi)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status pernikahan kepala rumah tangga, lokasi rumah tangga, dan jenis kelamin rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan multidimensi.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi
10	Sukardi, Karina. (2021)	Analisis Kemiskinan Multidimensi Masyarakat gorong-Gorong Kelurahan Kebun Sirihdi Kabupaten Mimika	Kuantitatif Deskriptif	Masyarakat Gorong-gorong mengalami kemiskinan multidimensi yang ditandai oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan kondisi rumah yang tidak layak, serta diperburuk oleh hambatan psikologis berupa rasa tidak mampu, ketergantungan, dan rasa malu dalam menyuarakan kebutuhan.	Jurnal Kritis Volume 5 Nomor 2
11	Angelika, Angggi dkk (2024)	Dinamika Kebijakan Moneter dan Fiskal: Pengaruhnya terhadap Kemiskinan di ASEAN	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan di ketiga negara tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Inflasi dan suku bunga memiliki hubungan positif dengan kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi	Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
				dan pajak memiliki hubungan negatif.	
12	Alifah dan Imaningsih (2023)	Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, & Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kuantitatif, OLS	Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan secara parsial upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat pendidikan serta tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Equilibrium Volume 12. No. 1.
13	Chairunnisa dan Qintharah (2022)	Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-202	Kuantitatif	Penelitian ini menemukan bahwa kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan upah minimum kota/kabupaten tidak berpengaruh terhadap kemiskinan	Jurnal PETA Vol. 7 No
14	Adhitya, Bagus et al (2022)	Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik adalah fixed effect. Secara parsial, variabel pendidikan dan sanitasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga mendukung teori lingkaran kemiskinan dan teori human capital.	Journal of Economics and Business, 6(1)

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Sumber
				Pendidikan meningkatkan produktivitas dan peluang pendapatan, sementara sanitasi berkaitan dengan kesehatan yang memengaruhi kualitas kerja. Adapun variabel kesehatan dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2013–2020.	
15	Hartuti. Moonti. Sudirman (2023)	Pengaruh Tingkat Pendapatan Keluarga Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga.	Kuantitatif	Hasil penelitian Menujukan bahwa terdapat pengaruh tingkat pendapatan keluarga terhadap kemiskinan keluarga di desa talumopatu kecamatan tapa kabupaten Bone Bolango. Besaran pengaruh tingkat pendapatan keluarga terhadap kemiskinan rumah tangga 23,5% sedangkan sisanya sebesar 76,5% di jelaskan oleh variabel lainnya yang tidak di teliti dalam penelitian	JEBE, Volume (1), Issue (2)

Sumber: Peneliti, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan moneter adalah suatu kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, pengukuran kemiskinan dilakukan dengan melihat seberapa banyak pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang mampu

mencakup garis kemiskinan yang ditetapkan oleh otoritas statistik seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan moneter sering kali diukur berdasarkan pendapatan per kapita yang dibandingkan dengan garis kemiskinan, yang menunjukkan apakah seseorang atau rumah tangga berada di bawah standar penghidupan yang layak atau tidak.

Namun, kemiskinan bukanlah fenomena yang hanya dapat dijelaskan dengan satu variabel tunggal. Kemiskinan bersifat multidimensional, yang berarti bahwa banyak faktor yang saling terkait dan memengaruhi tingkat kemiskinan yang dialami oleh individu atau rumah tangga. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis berbagai variabel demografis, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, berikut kerangka pemikiran hubungan pengaruh yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan Usia Kepala Rumah Tangga (KRT) terhadap Kemiskinan Moneter

Usia merupakan lamanya seseorang hidup sejak lahir hingga waktu tertentu dan berkaitan langsung dengan kemampuan produktivitas individu dalam bekerja (Sukirno, 2018). Pada prinsipnya, seseorang yang berada pada usia produktif memiliki kemampuan fisik dan psikis lebih stabil sehingga peluang untuk bekerja dan memperoleh pendapatan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori produktivitas usia yang dikemukakan Todaro (2015), bahwa usia produktif memberi peluang ekonomi lebih besar dibanding usia nonproduktif. Selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawati (2022) yang menunjukkan bahwa usia kepala rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan dan

mampu menurunkan risiko kemiskinan. Berdasarkan teori dan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa semakin produktif usia KRT maka semakin besar peluang rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, hubungan usia KRT terhadap kemiskinan bersifat positif, artinya perubahan usia berpotensi memengaruhi kondisi kemiskinan rumah tangga.

2.3.2 Hubungan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT) terhadap Kemiskinan Moneter

Jenis kelamin merupakan atribut biologis dan sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan, yang kemudian membentuk peran dan kesempatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari (Mosse, 2014). Dalam konteks ekonomi rumah tangga, KRT laki-laki seringkali memiliki akses pekerjaan yang lebih luas dan pendapatan yang lebih stabil dibanding KRT perempuan. Teori gender menurut Mosse (2014) menyatakan bahwa struktur sosial dapat menyebabkan perbedaan kesempatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Nurzam (2020) yang menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin kepala keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, jenis kelamin KRT memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, karena perbedaan peran gender dapat memengaruhi tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi rumah tangga.

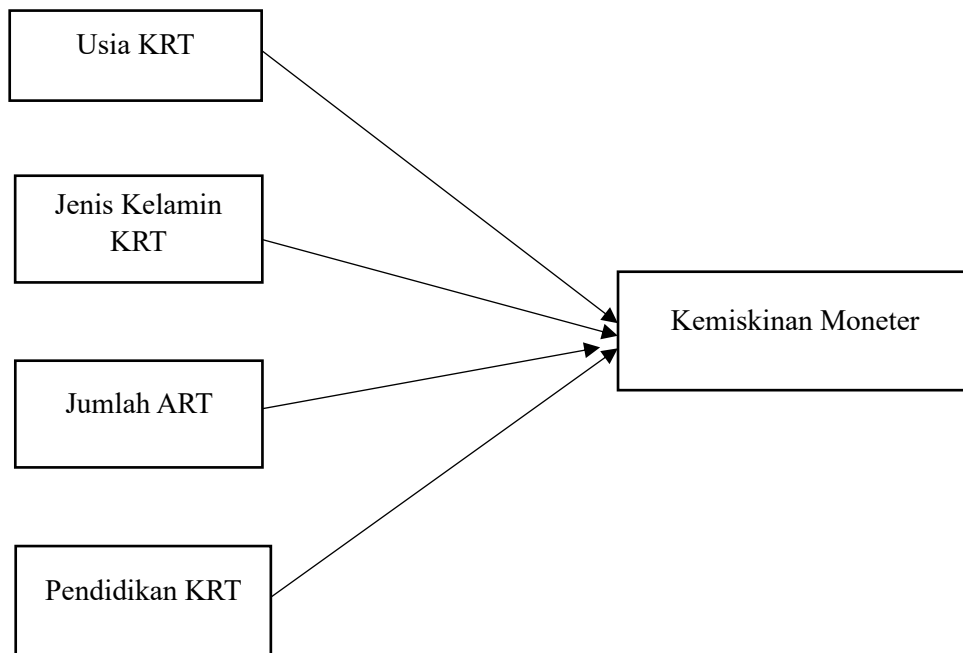
2.3.3 Hubungan Jumlah Anggota Rumah Tangga terhadap Kemiskinan Moneter

Jumlah anggota rumah tangga adalah total individu yang tinggal dan hidup bersama dalam satu kesatuan ekonomi rumah tangga (BPS, 2022). Semakin banyak

anggota rumah tangga, semakin tinggi pula kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Teori beban tanggungan atau dependency theory oleh Boserup (2010) menjelaskan bahwa banyaknya anggota keluarga meningkatkan beban konsumsi rumah tangga. Apabila pertambahan anggota keluarga tidak disertai peningkatan pendapatan, maka risiko kemiskinan akan meningkat. Temuan Herawati dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa jumlah tanggungan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, di mana semakin besar jumlah anggota rumah tangga maka semakin tinggi peluang jatuh ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu, hubungan jumlah anggota rumah tangga terhadap kemiskinan dapat dikatakan positif, karena semakin banyak beban tanggungan maka semakin tinggi risiko kemiskinan.

2.3.4 Hubungan Pendidikan Kepala Rumah Tangga terhadap Kemiskinan Moneter

Pendidikan merupakan proses peningkatan kemampuan individu melalui pembelajaran terstruktur, baik formal maupun nonformal, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Perspektif ini sejalan dengan teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang dikemukakan oleh Becker (1993), yang menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan seseorang. Temuan penelitian Sari (2021) menunjukkan bahwa pendidikan anggota keluarga memiliki pengaruh kuat dalam menurunkan kemiskinan karena meningkatkan akses pada pekerjaan yang lebih baik. Maka semakin tinggi pendidikan ART, semakin besar kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan kondisi ekonominya. Dengan demikian, pendidikan ART memiliki hubungan positif terhadap penurunan kemiskinan.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan rumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Variabel Usia Kepala Rumah Tangga (KRT), Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) dan variabel Jenis Kelamin KRT berpengaruh positif, sedangkan variabel Pendidikan KRT berpengaruh negatif secara parsial terhadap kemiskinan moneter di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024.
2. Variabel Usia KRT, Jenis Kelamin KRT, Jumlah ART, Pendidikan KRT berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemiskinan moneter di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024.